

PENUTUP

A. Simpulan

Walikota merupakan seorang aktor atau komunikator politik dalam realitas pemerintahan kota. Stabilisasi maupun sinergitas perpolitikan menjadi tanggung jawab yang harus dipegang untuk menegakkan dinamisasi politik kota. Bambang Dwi Hartono yang menjadi pemimpin pemerintahan kota Surabaya mampu melakukan proses komunikasi politik dalam birokrasi pemerintahan kota Surabaya. Dalam konteks reformasi birokrasi pemerintahan, proses yang dilakukan Bambang Dwi Hartono sebagai walikota Surabaya adalah dengan melakukan perombakan secara besar-besaran dengan meninggalkan metode yang berjalan di orde baru menuju model ala reformasi. Hal ini diperkuat dengan langkah-langkah Bambang Dwi Hartono dalam menumpas budaya KKN yang terjadi di kalangan pemerintahan kota Surabaya, menerapkan aturan seleksi penerimaan pegawai pemerintahan kota yang dilakukan dengan cara *fit and proper test* bukan atas dasar kerabat ataupun *urut kacang*, sampai membangun hubungan sinergitas antara Pemkot Surabaya dengan LSM menjadi lebih baik.

Sementara proses penegakan dan pelaksanaan supremasi hukum dilakukan Bambang Dwi Hartono dengan cara memahami bentuk heterogenitas masyarakat kota Surabaya dan bersikap tegas dalam menjalankan peraturan daerah (Perda). Bambang sebagai Walikota Surabaya beranggapan bahwa kota besar dengan salah satu cirinya yaitu

kultur heterogen dari masyarakatnya. Dengan adanya kultur heterogen tersebut, potensi konflik sangat besar sekali. Konflik tersebut dapat berupa ketegangan antar etnik, antar agama, antar kelas (kaya dan miskin), antar kelompok kepentingan, sampai antar Parpol. Ketika muncul potensi konflik, harus muncul kesadaran dari walikota untuk melakukan sebuah upaya solutif guna membuat stabilitas keamanan kota. Langkah yang dilakukan oleh Bambang Dwi Hartono adalah dengan membuat kerjasama dan kesepakatan antara antara pihak eksekutif (walikota) dengan legislatif (wakil rakyat di DPRD kota Surabaya) dalam membuat dan melaksanakan Peraturan daerah. Sehingga bentuk aturan yang mengatur daerah itu atau Perda sudah mengikat, maka Bambang sebagai kepala daerah mengatakan akan tegas dalam pelaksanaannya. Dan Bambang tidak akan ragu –ragu untuk menegakkan aturan itu.

Proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Bambang Dwi Hartono dalam sektor pelayanan publik adalah dengan menggunakan pola pengelolaan kota secara simultan dan memaksimalan anggaran kota/APBD kota Surabaya untuk pembangunan kota. Bambang memahami besarnya APBD kota Surabaya harus dimaksimalkan untuk membangun rumah sakit baru, membangun stadion yang bagus, mempermudah sambungan air bersih ke warga, pembangunan taman-taman di tengah kota, membebaskan uang SPP untuk pelajar SD, SMP, dan SMA, sampai membuat rapi jalan-jalan di kampung di Surabaya dengan pemasangan paving. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, masyarakat Surabaya seakan mampu melihat hasil kepemimpinan

Bambang Dwi Hartono sebagai walikota Surabaya yang memiliki program kebijakan yang populis kepada masyarakat.

Selanjutnya, proses komunikasi politik Bambang Dwi Hartono dalam konteks stabilitas politik lokal Surabaya adalah dengan melakukan komunikasi yang proporsional dengan anggota dewan serta tidak adanya bentuk penekanan (konsolidasi sistem kelembagaan internal), dan melakukan komunikasi politik yang baik sehingga dapat terwujud keseimbangan dan sinergitas dalam membangun kota Surabaya (konsolidasi sistem kelembagaan eksternal). Sementara, strategi Bambang Dwi Hartono dalam membangun stabilisasi politik lokal kota Surabaya adalah dengan menggunakan pola lain yaitu dengan menata bangunan komunikasi dan mencoba untuk merangkul semua kekuatan-kekuatan yang ada di kota Surabaya seperti organisasi kepemudaan (OKP), organisasi masyarakat (Ormas) dan partai politik di Surabaya serta memposisikan mereka pada posisi sebenarnya.

Dengan melihat berbagai proses komunikasi politik oleh Bambang Dwi Hartono sebagai walikota Surabaya, peneliti mampu menyimpulkan bahwa keberhasilan dalam birokrasi pemerintahan kota Surabaya dilakukan dengan cara memahami kultur masyarakat kota Surabaya, konsistensi penegakan dan pelaksanaan Perda, pengelolaan APBD secara maksimal, menata bangunan komunikasi yang baik dengan semua kalangan, dan memposisikan memposisikan semua orang maupun instansi kepada posisi yang sebenarnya.

B. Rekomendasi

Penelitian mengenai komunikasi politik walikota ini seakan membuka wawasan pengetahuan baru dalam bidang komunikasi politik. Tetapi peneliti menyarankan kepada mahasiswa maupun pihak Prodi Ilmu Komunikasi untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai komunikasi birokrasi yang dijalankan oleh seorang calon walikota dalam menggalang dukungan massa.